

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan informasi penting yang bisa diambil, yaitu:

- a. Mengenai upaya penurunan *stunting* di Kota Depok. Didapatkan informasi bahwa:
  - 1) Secara tidak langsung, intervensi gizi sensitif di Kota Depok sudah dilaksanakan sejak tahun 2016;
  - 2) Target penurunan *stunting* Kota Depok tercantum di dalam RPJMD 2016 – 2021;
  - 3) Dasar hukum pelaksanaan penurunan *stunting* Kota Depok adalah Perpres No 18 Tahun 2020, Perda Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016, Perda Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017, dan Perda Kota Depok Nomor 2 Tahun 2015;
  - 4) SK tentang penetapan kelurahan lokus penurunan dan pencegahan *stunting* tahun 2021 di Kota Depok sudah ditetapkan pada tahun 2020; serta
  - 5) Program atau kegiatan yang sudah direncanakan difokuskan untuk penurunan *stunting* di Kota Depok dan akan diimplementasikan pada tahun 2021 secara terintegrasi.
- b. Mengenai tim khusus percepatan penurunan *stunting* Kota Depok. Didapatkan informasi bahwa:
  - 1) Sebelum adanya arahan dari Pemerintah Pusat terkait penurunan *stunting* dilakukan secara terintegrasi di kabupaten/kota, OPD Kota Depok masih menjalankan programnya secara sendiri-sendiri;
  - 2) Tim khusus percepatan penurunan *stunting* di Kota Depok memang belum ada secara resmi karena SK Wali Kota nya sedang dalam proses pembuatan;

- 3) Setelah SK Wali Kota mengenai tim khusus percepatan penurunan *stunting* ditetapkan, pelaksanaan penurunan *stunting* akan dilakukan secara terintegrasi; serta
  - 4) Tim khusus percepatan penurunan *stunting* terdiri dari OPD Kota Depok secara lintas sektor.
- c. Mengenai implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif melalui peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi di Kota Depok. Didapatkan informasi bahwa:
- 1) Sudah terlaksananya intervensi gizi sensitif melalui program atau kegiatan yang terdapat di dalam Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten/Kota yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas yaitu penyediaan sarana prasarana air minum dan sanitasi dan STBM;
  - 2) Program atau kegiatan yang sudah dijalankan oleh Pemkot Depok adalah:
    - a) Penyediaan air minum dan sanitasi dengan cara melakukan pembangunan *septic tank*, IPAL Komunal, dan SPAM oleh Disrumkim;
    - b) Pembentukan KPP oleh Disrumkim;
    - c) STBM oleh Dinkes dan Disrumkim; dan
    - d) Pemberian edukasi dan pemeriksaan kualitas air melalui IKL oleh Dinkes.
  - 3) Masing-masing program atau kegiatan sudah berjalan sesuai dengan SOP atau Juknis yang ada;
  - 4) Dalam pelaksanaan program atau kegiatan, terdapat kendala teknis. Contohnya adalah keterbatasan lahan, koordinasi yang kurang baik, serta kesadaran masyarakat Kota Depok yang sulit dirubah;
  - 5) Metode koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program atau kegiatan dilakukan baik secara lintas sektor ataupun secara internal per OPD. Metode dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi per masing-masing program atau kegiatan;

- 6) Wali Kota dan pihak diluar OPD seperti organisasi profesi, akademisi, pihak swasta, dan masyarakat terlibat dalam program atau kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung; serta
  - 7) Program atau kegiatan yang dilakukan berdampak positif kepada masyarakat.
- d. Mengenai implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan di Kota Depok. Didapatkan informasi bahwa:
- 1) Sudah terlaksananya intervensi gizi sensitif melalui program atau kegiatan yang terdapat di dalam Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten/Kota yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas yaitu KB dan JKN;
  - 2) Program atau kegiatan yang sudah dijalankan oleh Pemkot Depok adalah:
    - a) Program KB oleh DPAPMK;
    - b) JKN dan PBI Non Kuota oleh Dinkes dan Dinsos;
    - c) Kegiatan akreditasi di Fasyankes oleh Dinkes;
    - d) Pemberian TTD dan PMT oleh Dinkes;
    - e) Pengadaan lomba ASI Eksklusif oleh Dinkes;
    - f) Pelayanan TFC di puskesmas; dan
    - g) Program Kota Sehat Depok yang dikoordinir oleh Dinkes.
  - 3) Masing-masing program atau kegiatan sudah berjalan sesuai dengan SOP atau Juknis yang ada;
  - 4) Dalam pelaksanaan program atau kegiatan, terdapat kendala teknis. Contohnya adalah anggaranketerbatasan lahan, koordinasi yang terbatas, kendala administrasi, dan kurang baik, serta kesadaran masyarakat Kota Depok terkait kesehatan yang masih rendah sulit dirubah;
  - 5) Metode koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program atau kegiatan dilakukan baik secara lintas sektor ataupun secara internal per OPD. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan dengan turun langsung ke

lokasi. Metode dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi per masing-masing program atau kegiatan; serta

- 6) Wali Kota dan pihak diluar OPD seperti organisasi profesi, akademisi, pihak swasta, dan masyarakat terlibat dalam program atau kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Mengenai implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif melalui peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak. Didapatkan informasi bahwa:
- 1) Sudah terlaksananya intervensi gizi sensitif melalui program atau kegiatan yang terdapat di dalam Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten/Kota yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas yaitu penyebarluasan informasi terkait gizi, penyediaan konseling, penyediaan PAUD dan promosi stimulasi anak usia dini, serta program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 2) Program atau kegiatan yang sudah dijalankan oleh Pemkot Depok adalah:
    - a) Penyebarluasan informasi melalui BKB, BKR, BKL, dan PIK Remaja oleh Dinkes dan DPAPMK;
    - b) Penyediaan konseling melalui Puspaga oleh Dinkes dan DPAPMK;
    - c) Penyediaan PAUD dan promosi stimulasi anak usia dini melalui Posyandu, Sekolah, Kecamatan, Kelurahan, hingga RW Ramah Anak oleh DPAPMK;
    - d) Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dan pembinaan oleh DPAPMK;
    - e) Perlindungan perempuan dan anak dengan membentuk Satgas PKDRT dan Unit PPA oleh DPAPMK; dan
    - f) P2WKSS yang dilaksanakan oleh lintas OPD Kota Depok.
  - 3) Masing-masing program atau kegiatan sudah berjalan sesuai dengan SOP atau Juknis yang ada;
  - 4) Dalam pelaksanaan program atau kegiatan, terdapat kendala teknis. Contohnya adalah anggaran yang terbatas, kendala administrasi, dan

kesadaran masyarakat Kota Depok terkait kesehatan yang masih rendah;

- 5) Metode koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program atau kegiatan dilakukan baik secara lintas sektor ataupun secara internal per OPD. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan dengan turun langsung ke lokasi atau melalui *website* resmi Pemkot Depok. Metode dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi per masing-masing program atau kegiatan;
  - 6) Wali Kota dan pihak diluar OPD seperti organisasi profesi, akademisi, pihak swasta, dan masyarakat terlibat dalam program atau kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung; serta
  - 7) Program atau kegiatan yang dilakukan berdampak positif kepada masyarakat.
- f. Mengenai implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif melalui peningkatan akses pangan bergizi. Didapatkan informasi bahwa:
- 1) Sudah terlaksananya intervensi gizi sensitif melalui program atau kegiatan yang terdapat di dalam Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten/Kota yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas yaitu KRPL, PKH, dan BPNT;
  - 2) Program atau kegiatan yang sudah dijalankan oleh Pemkot Depok adalah:
    - a) PKH dan BPNT oleh Dinsos;
    - b) KPRL oleh DKP3;
    - c) Pelatihan untuk meningkatkan produksi dibidang pertanian, perikanan, dan peternakan oleh DKP3; dan
    - d) Edukasi melalui Gerakan Konsumsi Makan Asal Hewan, Gerakan Konsumsi Makan Ikan, dan Gerakan Konsumsi Pangan B2SA oleh DKP3, Disdik, dan Dinkes.
  - 3) Masing-masing program atau kegiatan sudah berjalan sesuai dengan SOP atau Juknis yang ada;
  - 4) Dalam pelaksanaan program atau kegiatan, terdapat kendala teknis. Contohnya adalah kurang masifnya pelaksanaan program,

ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah yang masih tinggi, dan permasalahan administrasi;

- 5) Metode koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program atau kegiatan dilakukan baik secara lintas sektor ataupun secara internal per OPD. Metode dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi per masing-masing program atau kegiatan;
- 6) Wali Kota dan pihak diluar OPD seperti organisasi profesi, akademisi, pihak swasta, dan masyarakat terlibat dalam program atau kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung; serta
- 7) Program atau kegiatan yang dilakukan berdampak positif kepada masyarakat.

g. Mengenai dampak intervensi gizi sensitif terhadap penurunan *stunting* di Kota Depok. Didapatkan informasi bahwa program atau kegiatan intervensi gizi sensitif yang sudah dilakukan oleh OPD Kota Depok bersama Pendukung Pelaksanaan Program berkontribusi terhadap penurunan kejadian *stunting* di Kota Depok.

## **V.2 Saran**

### **V.2.1 Bagi Informan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan pelaksanaan program atau kegiatan penurunan *stunting* di Kota Depok kedepannya.

### **V.2.2 Bagi Institusi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi dalam penyajian masalah gizi *stunting* dan panduan untuk peneliti lain yang mau melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif dalam menurunkan kejadian *stunting*.

### **V.2.3 Bagi Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan keilmuan maupun penelitian khususnya dibidang kebijakan gizi.